

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka kesimpulan akhir tentang penerapan Tata Kelola Keuangan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang berfokus pada pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2017 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Tanjung Rejo dalam pengelolaan Dana Desa sudah menerapkan prinsip transparansi dengan melakukan sosialisasi tentang Dana Desa, pembuatan plang pengerjaan serta papan himbauan anggaran, dan mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah dusun, musyawarah Desa, dan musyawarah Perdes SPJ – APBDesa Tanjung Rejo dalam tahun anggaran 2017. Tetapi sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait Keuangan Desa dan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa masih kurang baik.
2. Pemerintah Desa Tanjung Rejo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu dengan menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan melaksanakan setiap program yang direncanakan, melakukan penatausahaan pengelolaan Dana Desa, dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (SPJ – APBDesa) Tahun Anggaran 2017.
3. Pemerintah Desa Tanjung Rejo sudah menerapkan prinsip partisipatif yang dibuktikan dengan Pemerintah Desa Tanjung Rejo selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa yaitu dari proses

4. perencanaan dengan melakukan musyawarah dusun untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk proses pelaksanaan Peremerintah Desa mengutamakan pengerjaan pembangunan dengan sistem swakelola yaitu mempekerjakan masyarakat dalam proses pembangunan, dan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah Perdes SPJ – APBDesa Tanjung Rejo tahun anggaran 2017.
5. Pemerintah Desa Tanjung Rejo tidak menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran karena Pemerintah Desa Tanjung Rejo tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APBDesa sehingga pencairan Dana Desa menjadi terlambat dan proses pembangunan pun menjadi terlambat.
6. Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Rejo dimulai dari melakukan musyawarah dusun untuk mengumpulkan usulan-usulan masyarakat dari 13 dusun yang ada di Desa Tanjung Rejo, selanjutnya usulan tersebut di bawa ke musyawarah Desa (musrenbang Desa) untuk dibahas dan ditentukan yang menjadi prioritas. Hasil musrenbang Desa selanjutnya di bawa ke forum musyawarah Kecamatan untuk di sepakati dan di bawa ke Kabupaten untuk pencairan Dana Desa.
7. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Rejo dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing bidang dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana yang bertujuan untuk kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Tanjung Rejo bersifat swakelola yang mana Pemerintah

Desa Tanjung Rejo mempekerjakan masyarakat Desa untuk melakukan pembangunan Desa.

8. Penatausahaan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Rejo dengan membuat Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Dan Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Tanjung Rejo. Penatausahaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan pada tahun 2017 sebagian besar sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan masih ada yang dilakukan secara manual.
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di bidang Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan untuk disatukan menjadi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (SPJ – APBDesa) Tanjung Rejo Tahun Anggaran 2017.
10. Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Rejo pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 921.536.000.-. Proses pencairan Dana Desa dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama 60% sebesar 552.921.600.- pada Agustus 2017 dan tahap kedua 40% SEBESAR Rp. 368.614.400.- pada November 2017. Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Rejo pada tahun 2017 digunakan untuk program prioritas pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo berupa pemasangan *paving block*, perbaikan jembatan, pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT), dan pembangunan jaringan Pipanisasi PAMSIMAS yang diutamakan untuk pembangunan di

wilayah Utara Desa Tanjung Rejo. Sedangkan untuk program pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita POSYANDU, honor kader POSYANDU, dan honor PPKBD.

11. Pelaksanaan program prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Rejo memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa. Hal ini dapat dilihat dari respon yang diberikan masyarakat. Program pembangunan yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo memberikan perubahan yang cukup baik dengan memperbaiki kualitas infrastruktur di Desa. Pembangunan di beberapa lorong juga di prioritaskan karena adanya puskesmas dan sekolah yang merupakan fasilitas umum Desa Tanjung Rejo. Manfaat lain yang diberikan adalah pembangunan yang dilakukan mempermudah akses warga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Disamping adanya respon positif, masih ada masyarakat yang memberikan respon kurang baik. Hal ini disebabkan pembangunan yang dilakukan dilorong atau dijalan sekitar rumah mereka tidak sesuai dengan kebutuhan dan berbeda dengan pembangunan di lorong yang lain. Untuk program pemberdayaan masyarakat Desa juga memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat yang menerimanya. Hal ini dilihat dari respon positif dari para orangtua yang membawa anaknya POSYANDU karena menerima makanan tambahan setiap bulannya, hal ini menjadikan masyarakat lebih termotivasi dan semangat untuk membawa balitanya POSYANDU. Pemberian honor kader POSYANDU dan honor PPKBD juga dilakukan atas pekerjaan yang kader POSYANDU dan PPKBD lakukan untuk Desa Tanjung Rejo.

12. Dalam melakukan tata kelola keuangan Desa tidak terlepas dari peran sumber daya manusia (SDM) Perangkat Desa. Perangkat Desa di Pemerintahan Desa Tanjung Rejo terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kepala Urusan Umum Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa, 13 orang Kepala Dusun, Ketua BPD, dan Ketua LKMD. Tingkat pendidikan dari Perangkat Desa Tanjung Rejo yaitu 5 orang tamatan Sarjana/Diploma, 18 orang tamatan SMA, dan 1 orang tamatan SMP. Disamping tingkat pendidikan Perangkat Desa, pengalaman juga dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan di Pemerintahan Desa Tanjung Rejo. Pengalaman Perangkat Desa Tanjung Rejo dirasa cukup baik dengan pengalaman rata-rata Perangkat Desa bekerja di Pemerintahan Desa Tanjung Rejo lebih dari lima tahun. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, kualitas dan pemahaman Perangkat Desa Tanjung Rejo masih kurang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas dari Pemerintahan Desa agar dapat menerapkan prinsip tata kelola keuangan Desa yang baik dalam pengelolaan Dana Desa dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, agar tidak terjadi keterlambatan lagi kedepannya.

2. Melakukan penyegaran dan memberikan pelatihan serta pemahaman kepada seluruh Perangkat Desa tentang Dana Desa dan semua hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa. Menjelaskan seluruh tugas pokok dan fungsi dari organisasi yang ada di Desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Perangkat Desa dan lembaga Desa.
3. Pemerintah Desa harus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Desa Tanjung Rejo, tidak hanya kepada masyarakat tertentu seperti kepala dusun, ketua RT, organisasi Desa, dan tokoh masyarakat saja. Hal ini dikarenakan Dana Desa adalah hak seluruh masyarakat Desa, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Menjelaskan dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang sistem kerja dari Dana Desa di Desa Tanjung Rejo. Menjelaskan semua kebijakan-kebijakan yang dibuat terkait dengan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat agar nantinya masyarakat tidak berpikiran bahwa ada ketidakadilan dalam melakukan pembangunan di Desa Tanjung Rejo.
4. Menjalin hubungan yang baik antar Pemerintah Desa dengan seluruh masyarakat agar kedepannya masyarakat tidak sungkan untuk bertanya kepada Pemerintah Desa segala hal yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, dan semua hal yang berkaitan dengan urusan Desa. Pemerintah Desa juga bisa menyediakan kotak saran yang di pasang di Kantor Desa atau di setiap dusun untuk warga menyampaikan saran dan keluhannya.